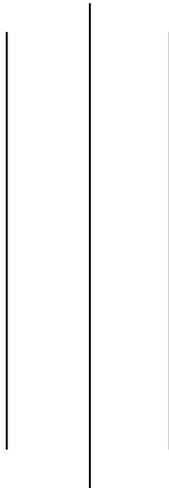




**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA GUNUNGSITOLI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN : WAJIB - KESEHATAN



**PD : DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2022**

b. KESEHATAN**1. Kondisi Umum**

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan Kota Gunungsitoli diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli yang diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata diseluruh wilayah dan mudah diakses oleh masyarakat.

Program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan perbekalan kesehatan dan obat-obatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin serta peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan/medis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah di bidang kesehatan.

Cakupan penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan Kota Gunungsitoli tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel b.1.1: Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan		
			Puskesmas	Pustu	Poskesdes
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Gunungsitoli	Unit	2	4	5
2	Gunungsitoli Idanoi	Unit	2	2	12
3	Gunungsitoli Selatan	Unit	1	6	3
4	Gunungsitoli Barat	Unit	1	2	4
5	Gunungsitoli Utara	Unit	1	3	7
6	Gunungsitoli Alo'oa	Unit	1	1	8
Jumlah Total			8	18	39

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.2: Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Puskesmas Rawat Inap	Unit	6
2	Puskesmas Rawat Jalan	Unit	2
3	Posbindu	Unit	1
4	Poliklinik	Unit	8
5	Apotik	Unit	33
6	Puskesmas Pembantu	Unit	18
7	Poskesdes	Unit	39
8	Praktek Dokter	Unit	15
Jumlah Total			122

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli



Tabel b.1.3: Jumlah Puskesmas Keliling Menurut Kecamatan Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Puskesmas Keliling
[1]	[2]	[3]	[5]
1	Gunungsitoli	Unit	1
2	Gunungsitoli Idanoi	Unit	2
3	Gunungsitoli Selatan	Unit	-
4	Gunungsitoli Barat	Unit	1
5	Gunungsitoli Utara	Unit	1
6	Gunungsitoli Alo'oa	Unit	2
Jumlah Total			7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.4: Jumlah Ambulance Menurut Kecamatan Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Ambulance
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Gunungsitoli	Unit	2
2	Gunungsitoli Idanoi	Unit	1
3	Gunungsitoli Selatan	Unit	1
4	Gunungsitoli Barat	Unit	-
5	Gunungsitoli Utara	Unit	-
6	Gunungsitoli Alo'oa	Unit	-
Jumlah Total			4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.5: Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Kefarmasian Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2021

No	Uraian Jenis	Satuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Gudang farmasi	Unit	1
2	Mobil Box obat Gudang Farmasi	Unit	1
Jumlah Total			2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.6: Jumlah Kunjungan Pasien Miskin Di UPTD Kecamatan Pada Pengelolaan Kapitasi JKN (Jaminan kesehatan Nasional) Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	UPTD Kecamatan	Satuan	Jumlah Kunjungan Pasien miskin
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Gunungsitoli	Orang	129.410
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	38.322
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	44.205
4	Gunungsitoli Barat	Orang	15.448
5	Gunungsitoli Utara	Orang	25.236
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	15.241
Jumlah Total			267.862

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli



Tabel b.1.7: Jumlah Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Menurut Kecamatan Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	UPTD Kecamatan	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat Jamkesda	Jumlah Penerima Manfaat (PBI) APBD Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PBI) APBN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Gunungsitoli	Orang	5.446	891	24.654
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	1.008	885	15.963
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	1.132	302	7.669
4	Gunungsitoli Barat	Orang	1.080	214	4.361
5	Gunungsitoli Utara	Orang	1.013	410	10.922
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	629	584	4.922
Jumlah			10.308	3.286	68.491

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.8: Prevelensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) Pada Anak Balita Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Balita <i>Underweight</i>	Jumlah Sasaran Balita
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Gunungsitoli	Orang	115	3.555
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	99	1.970
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	59	1.093
4	Gunungsitoli Barat	Orang	12	693
5	Gunungsitoli Utara	Orang	92	1.323
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	28	628
Jumlah Total			405	9.262

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.9: Angka Kematian Ibu (AKI) Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Gunungsitoli	Orang	2	712
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	0	361
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	1	192
4	Gunungsitoli Barat	Orang	0	108
5	Gunungsitoli Utara	Orang	0	246
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	0	105
Jumlah Total			3	1.724

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli



Tabel b.1.10: Angka Kematian Bayi (AKB) Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Gunungsitoli	Orang	9	712
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	3	361
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	6	192
4	Gunungsitoli Barat	Orang	0	108
5	Gunungsitoli Utara	Orang	2	246
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	2	105
Jumlah Total			22	1.724

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.11: Angka Kematian Balita (AKABA) Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Kasus Kematian Balita	Jumlah Sasaran Balita
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Gunungsitoli	Orang	4	3.555
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	0	1.970
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	0	1.093
4	Gunungsitoli Barat	Orang	1	693
5	Gunungsitoli Utara	Orang	0	1.323
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	0	628
Jumlah Total			5	9.262

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.12: Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (*bawah dua tahun*) Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Baduta <i>stunting</i>	Jumlah Sasaran Baduta
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Gunungsitoli	Orang	27	1.266
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	49	724
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	17	406
4	Gunungsitoli Barat	Orang	1	227
5	Gunungsitoli Utara	Orang	18	342
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	8	227
Jumlah Total			120	3.192

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.13: Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Dokter Umum	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Gunungsitoli	Orang	8	2	10
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	4	1	5
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	7	1	8
4	Gunungsitoli Barat	Orang	4	1	5
5	Gunungsitoli Utara	Orang	5	1	6
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	3	-	3
Jumlah Total			31	6	37

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel b.1.14: Jumlah Paramedis Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Perawat	Jumlah Perawat Gigi	Jumlah Bidan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Gunungsitoli	Orang	55	3	118	176
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	38	2	72	112
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	25	1	53	79
4	Gunungsitoli Barat	Orang	16	1	39	56
5	Gunungsitoli Utara	Orang	20	0	51	71
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	14	1	30	45
Jumlah Total			168	8	363	539

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian indikator kinerja program berdasarkan target RPJMD Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel b.2: Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2021	
			Target	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 10.000 KH	27	17,40
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	19,5	12,76
3	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	Per 1.000 KH	-18,5	-11,76
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	10	0,54
5	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita	Persen	18	4,37
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	Persen	32	3,76



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2021	
			Target	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	(bawah dua tahun)			
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	78	71,32
8	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	76,92	100
9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1.000 pddk	0,22	0,26
10	Rasio Paramedis Per Satuan Penduduk	Per 1.000 pddk	2,96	3,75
11	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	Per 1.000 pddk	0,07	0,19
12	Rasio Poskesdes Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan	Persen	89,74	38,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data bahwa terdapat dua indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai target yakni sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada tahun 2021 target indikator kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) yakni 78 tahun. Menentukan Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Gunungsitoli masih menggunakan data yang telah dianalisis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gunungsitoli setiap tahunnya dan untuk tahun 2021 pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Gunungsitoli yakni 71,32 tahun. Dinas Kesehatan akan terus berupaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan mendorong kualitas hidup usia lanjut melalui peningkatan pelayanan kesehatan serta dengan meningkatkan mutu layanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, pemerataan akses pelayanan, standarisasi layanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, serta pelibatan pemangku kepentingan dan lintas sektor dalam penyelenggaraan program kesehatan, selain itu dapat dilakukan juga dengan meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan setiap masyarakat agar dapat berperilaku hidup sehat, bagi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2. Rasio Poskesdes Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan

Pada tahun 2021, jumlah Poskesdes di wilayah Kota Gunungsitoli yakni sebanyak 39 unit yang berada di 39 desa di Wilayah Kota Gunungsitoli, sedangkan jumlah seluruh Desa/Kelurahan di Kota Gunungsitoli sebanyak 101 desa/kelurahan, sehingga dapat disimpulkan capaian indikator kinerja rasio poskesdes di Kota Gunungsitoli tahun 2021 sebesar 38,61 %. Adapun target pencapaian indikator kinerja Rasio Poskesdes pada tahun 2021 yakni



89,74% yang artinya setidaknya-tidaknya terdapat 90 unit Poskesdes di Wilayah Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli terus mendorong peran serta pemerintah desa dalam penyediaan Poskesdes.

3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan revisi dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021, maka dapat dirumuskan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel b.3 : Pelaksanaan Program Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan 2. Peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan 3. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat 4. Peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 6. Peningkatan dan penguatan surveilans kesehatan serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 7. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melaksanakan penyelidikan epidemiologi 8. Peningkatan implementasi Sanitasi Total Berbasis 	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan bahan logistik kantor 	<p>100%</p> <p>12 Bulan</p> <p>68 Orang</p> <p>10 Orang</p> <p>2 Jenis</p> <p>4 Jenis</p> <p>34 Jenis</p>	<p>100%</p> <p>12 Bulan</p> <p>68 Orang</p> <p>10 Orang</p> <p>2 Jenis</p> <p>4 Jenis</p> <p>34 Jenis</p>	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Masyarakat (STBM) di seluruh Desa/ Kelurahan						
			9. Peningkatan keterjaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
			10. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat	5. Fasilitasi kunjungan tamu	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-
			11. Peningkatan kampanye kesehatan dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
			12. Peningkatan pengendalian dan pengawasan tempat fasilitas umum (TFU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan	1. Pengadaan Mebel	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
			14. Pemenuhan SDM Kesehatan dan peningkatan kompetensi sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			15. Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi	1. Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	1 unit	1 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>pengendalian program/ kegiatan</p> <p>16. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi lintas program/ lintas sektor dalam pembangunan kesehatan</p>	<p>atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</p>	<p>54 Unit</p> <p>5 Jenis</p> <p>12 Jenis</p>	<p>54 Unit</p> <p>5 Jenis</p> <p>12 Jenis</p>	-	-	-
2	Sda	Sda	sda	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pengembangan Puskesmas</p> <p>2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>100%</p> <p>1 Unit</p> <p>1 Unit</p>	<p>93,4%</p> <p>1 Unit</p> <p>1 Unit</p>	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Jenis	5 Jenis	Spesifikasi alat yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan tidak terdapat dan tidak tayang didalam sistem e-purchasing dan bila diadakan melalui mekanisme pengadaan langsung, berdasarkan survey oleh PPK, penyedia tidak memenuhi syarat harga satuan yang telah ditetapkan	pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan sistem e-purchasing	-
				4. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8 Puskesmas	8 Puskesmas	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5. Pengadaan obat, vaksin	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				6. Pengadaan bahan habis pakai	4 Jenis	3 Jenis	Spesifikasi alat yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan tidak terdapat dan tidak tayang didalam sistem e-purchasing dan bila diadakan melalui mekanisme pengadaan langsung, berdasarkan survey oleh PPK, penyedia tidak memenuhi syarat harga satuan yang telah ditetapkan	Pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan sistem e-purchasing	-
				7. Distribusi Alat Kesehatan, Vaksin, Obat, Bahan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</p> <p>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana</p> <p>5. Pengelolaan Pelayanan</p>	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan Masyarakat Gizi					
				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				8. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				9. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				10. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				11. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				12. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				13. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	4 Pusk	-	Keputusan Kementerian Kesehatan, dimasa Pandemi Covid-19 pelaksanaan akreditasi puskesmas ditunda pelaksanaannya	Mengoptimalkan pelayanan fasilitas kesehatan yang sudah terakreditasi	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 orang	1 orang	-	-	-
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4 Pusk	4 Pusk	-	-	-
3	sda	sda	sda	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	100%			
					313 orang	313 orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-
4	sda	sda	sda	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	100%	100%			
					12 Bulan	12 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	sda	sda	sda	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100% 10 orang	100% 10 orang	-	-	-
6	sda	sda	sda	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	100% 3 Lembaga	100% 3 Lembaga	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	sda	sda	sda	<p>Unit Organisasi : UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>5. Pengelolaan Pelayanan</p>	100%	100%			
					12 Bulan	12 bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 bulan	-	-	-
					12 Bulan	12 bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12 Bulan	12 bulan	-	-	-
				11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				12. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				13. Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan	12 bulan	-	-	
				14. Investigasi Awal Kejadian Tidak	12 Bulan	12 bulan	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Bimbingan Teknis dan Supervisi</p>	100%	100%			
				1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3 orang	3 orang	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1. Bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun	1 tahun	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12 Bulan	12 bulan	-		
				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12 Bulan	12 bulan	-		
				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan	12 bulan	-		
				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	12 bulan	-		
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 bulan	-		
				9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-		
				10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-		
				11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12 Bulan	12 bulan	-		
				12. Pelayanan Kesehatan Penyakit	12 Bulan	12 bulan	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>Unit Organisasi : UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang</p>	100%	100%			
					12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dengan Gangguan Jiwa Berat					
				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12 Bulan	12 bulan	-		
				6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan	12 bulan	-		
				7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Bulan	12 bulan	-		
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 bulan	-		
				9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-		
				10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12 Bulan	12 bulan	-		
				11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	12 bulan	-		
				12. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 bulan	-		
				13. Operasional	12 Bulan	12 bulan	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelayanan Puskesmas PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	100%			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	2 orang	2 orang	-		
					100%	100%			
					1 Tahun	1 tahun	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>Unit Organisasi: UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>4. Pengelolaan Pelayanan</p>	100%	100%			
				1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 Bulan	12 bulan	-		
				2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12 Bulan	12 bulan	-		
				3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12 Bulan	12 bulan	-		
				4. Pengelolaan Pelayanan	12 Bulan	12 bulan	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10. Operasional Pelayanan Puskesmas PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</p> <p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah</p> <p>Kabupaten/Kota</p> <p>1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>Unit Organisasi : UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN</p>	<p>1 orang</p> <p>100%</p> <p>1 Tahun</p> <p>100%</p>	<p>1 orang</p> <p>100%</p> <p>1 tahun</p> <p>100%</p>	<p>-</p> <p>-</p>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		
					12 Bulan	12 bulan	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10. Operasional Pelayanan Puskesmas Unit Organisasi: UPTD Puskesmas Kauko PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan	- - - - - -		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12 Bulan	12 bulan	-		
				3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12 Bulan	12 bulan	-		
				4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Bulan	12 bulan	-		
				5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	12 bulan	-		
				6. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-		
				7. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-		
				8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12 Bulan	12 bulan	-		
				9. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	12 bulan	-		
				10. Pengelolaan Jaminan Kesehatan	12 Bulan	12 bulan	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Masyarakat 11. Operasional Pelayanan Puskesmas PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Unit Organisasi: UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan	12 Bulan 100%	12 bulan 100%	-		
				1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Unit Organisasi: UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan	1 Tahun 100%	1 tahun 100%	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 8. Pelayanan	12 Bulan	12 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	12 bulan			
				9. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 bulan			
				10. Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan	12 bulan			

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib bidang kesehatan TA. 2021 telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja, namun terdapat 1 (satu) program yang tidak mencapai target sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, yaitu capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 93,4% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat TA. 2021 terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan yakni Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 81,3 % dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 92,3 %.

Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan yakni Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai. Hal ini disebabkan sebagian Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam tahap perencanaan tidak tersedia dan tidak tayang dalam sistem e-purchasing dan bila diadakan melalui mekanisme pengadaan langsung, berdasarkan survey oleh PPK, penyedia tidak memenuhi syarat harga satuan yang telah ditetapkan.

Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan yakni Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh Keputusan Kementerian Kesehatan, dimasa pada masa Pandemi Covid-19 pelaksanaan akreditasi puskesmas ditunda sementara pelaksanaannya.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

Adapun Kebijakan Strategis yang dilaksanakan oleh Wali Kota Gunung Sitoli pada Tahun 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Kebijakan Strategis Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yaitu Bantuan siswa berprestasi untuk SD Negeri dan Swasta	Surat keputusan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 420-298 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Biaya Personil Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2021	Meningkatnya mutu pendidikan serta motivasi siswa untuk belajar dan membantu biaya operasional siswa (bagi siswa yang kurang mampu)
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar yaitu Bantuan siswa berprestasi untuk SMP Negeri dan SMP Swasta	Surat keputusan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 420-298 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Biaya Personil Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2021	Meningkatnya mutu pendidikan serta motivasi siswa untuk belajar dan membantu biaya operasional siswa (bagi siswa yang kurang mampu)
3.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu adanya Guru Kontrak Daerah (GKD) Jenjang PAUD	Surat keputusan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 420-16 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah di Kota Gunung Sitoli Tahun 2021	Diangkatnya guru kontrak daerah (GKD) sehingga terpenuhi dan meratanya tenaga pendidik di satuan pendidikan PAUD
4.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu	Surat keputusan Wali Kota Gunung Sitoli Nomor 420-16 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah di	Diangkatnya guru kontrak daerah (GKD) sehingga terpenuhi dan meratanya tenaga pendidik di satuan



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	adanya Guru Kontrak Daerah (GKD) Jenjang SD	Kota Gunungsitoli Tahun 2021	pendidikan SD
5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu adanya Guru Kontrak Daerah (GKD) Jenjang SMP	Surat keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 420-16 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kembali Guru Kontrak Daerah di Kota Gunungsitoli Tahun 2021	Diangkatnya guru kontrak daerah (GKD) sehingga terpenuhi dan meratanya tenaga pendidik di satuan pendidikan SMP
6.	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2021	Menjadi pedoman Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang yang bersifat fungsional dan secara profesional
7.	Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Gunungsitoli Tahun 2021	Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 440 - 130 Tahun 2021	Mencegah peningkatan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta menelusuri sebab penyakit dan kematian ibu/bayi dengan tujuan untuk mencegah penyakit dan kematian maternal perinatal dimasa yang akan datang di wilayah Kota Gunungsitoli
8.	Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kota Gunungsitoli Tahun 2021	Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 440 - 129 Tahun 2021	Pedoman dalam Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif serta penentuan Desa Prioritas intervensi lintas sektor di Kota Gunungsitoli
9.	Pemasukan Ternak Babi Ke Wilayah Kota Gunungsitoli	Instruksi Wali Kota Gunungsitoli Nomor 520/1/Diskeptan/2021, Tanggal 02 Februari 2021	Mengatasi kelangkaan ternak/daging babi yang mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Gunungsitoli
10.	Salah Satu Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No. 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan 2. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli No. 18 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No. 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
11.	Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Gunungsitoli	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 640-223 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Gunungsitoli.	1. Untuk menyelesaikan masalah perkumuhan Kota Gunungsitoli. 2. merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengentasan permukiman kumuh. 3. Merupakan Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman.
12.	Pengadaan Tanah Pemakaman	Surat Edaran KPK No. 8 Tahun 2020, Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19	Tersediannya Perluasan Lahan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19 di Kota Gunungsitoli. Luas Tanah = 4871 M2
13.	Pengembangan kepariwisataan yang dapat mendukung penguatan perekonomian daerah	Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Gunungsitoli Tahun 2017 - 2025	Mewujudkan kepariwisataan yang dapat mendukung penguatan perekonomian daerah
14.	Pelestarian serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah yang berbasis masyarakat lokal berdaya saing, berbudaya, religius dan berciri khas Nias	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 050-376 Tahun 2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Gunungsitoli	Mewujudkan masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal
15.	Pedoman Tatacara Norma Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kota Gunungsitoli	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2021	Menjadi Pedoman Tatacara Norma Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli
16.	Pembayaran retribusi secara non tunai	Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No. 1 Tahun 2021	Mempermudah dan mempercepat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat.
17.	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB)	SK SOP pada Balai Kir	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
18.	Dokumen SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Perwal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
19.	Percepatan Penyaluran Dana Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 20212. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021	Desa mampu menetapkan RKPDes dan APDes pada awal tahun anggaran berjalan
20.	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Gunungsitoli 2019-2023	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai dasar penyusunan rencana dan kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah serta sebagai mekanisme pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;• Sebagai dasar dalam melakukan review atau penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah /RTRW;• Sebagai dasar koordinasi dan sinkronisasi program dalam melakukan implementasi aksi yang dilakukan oleh mitra pemerintah atau stakeholder kepada komunitas terpapar dalam mengurangi risiko, menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan risiko bencana ditingkat komunitas terpapar dalam mengurangi risiko bencana;



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			<ul style="list-style-type: none">Sebagai dasar bagi masyarakat atau stakeholder untuk menyusun aksi praktis dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pembangunan tempat evakuasi, pembangunan tempat evakuasi sementara dan pemasangan rambu evakuasi.
21.	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2025	<ul style="list-style-type: none">Pedoman perencanaan pembangunan daerah, rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;Mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan penanggulangan bencana melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;Mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
22.	Penetapan Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kawasan Wisata Taman Ya'ahowu	Meningkatkan daya saing daerah
23.	Penetapan dan Pengembangan Desa Wisata di Kota Gunungsitoli	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 36 tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan dan Pengembangan Desa Wisata di Kota Gunungsitoli	Meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa melalui sektor pariwisata
24.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran sebelumnya merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan Kota Gunungsitoli pada masa yang akan datang.

Adapun rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli
Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Melakukan inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan para Guru, baik pada jenjang PAUD maupun jenjang Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan keadaan guru pada jenjang PAUD maupun jenjang Pendidikan Dasar melalui dokumen DAKL; Melakukan proses pemberian rekomendasi pengangkatan guru secara lebih selektif agar sesuai dengan kebutuhan 	Pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar dapat sesuai dengan kondisi sekolah yang ada.
2.	Percepatan pencairan gaji GKD diupayakan setiap bulan sehingga memberikan dampak yang positif kepada tenaga GKD dalam menjalankan tugasnya	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan percepatan proses evaluasi bagi GKD yang telah diangkat pada tahun sebelumnya Melakukan proses pengusulan penetapan GKD secara lebih optimal; Mengoptimalkan mekanisme pembayaran gaji yang melalui proses penatausahaan keuangan 	Upaya pemenuhan gaji GKD dapat diterima tepat waktu
3.	Melihat kebutuhan mendesak akan ketersediaan Ambulans keliling sebagai sarana layanan pendukung yang sangat dibutuhkan namun hingga saat ini masih terbatas, maka Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Kesehatan kiranya merencanakan penambahan atau pengadaan Ambulans keliling yang dimaksud	Penyediaan Ambulans melalui Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli telah merencanakan dan menganggarkannya pada APBD TA. 2022 yang pendanannya bersumber dari DAK Fisik TA. 2022 sebanyak 1 Unit Ambulans untuk UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Alo'oa	Mendukung cakupan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	<p>Keprihatinan para penerima manfaat BPJS Kesehatan yang bersumber dari dana Provinsi Sumatra Utara di beberapa desa ada yang sudah dihapus, maka diharapkan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan pendataan kembali dan memfasilitasi para penerima manfaat BPJS kesehatan yang dapat ditampung pada anggaran daerah Kota Gunungsitoli</p>	<p>Penyelenggaraan Kegiatan Jamkesda/ Jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui APBD Kota Gunungsitoli TA. 2022 telah dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan TA. 2022 dengan target sasaran sebanyak 10.650 orang dengan penerima manfaat adalah masyarakat tidak mampu, masyarakat yang BPJS sumber dana Provinsi Sumut telah di nonaktifkan, termasuk ibu hamil yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis namun tidak memiliki kartu jaminan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam rangka pendataan kembali, telah dilakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan hal ini akan terus dilakukan terkait dengan pemutakhiran data kepesertaan penerima manfaat jaminan kesehatan.</p>	<p>Memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis difasilitas pelayanan kesehatan</p>
5.	<p>Melakukan percepatan revisi Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 serta Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Gunungsitoli karena diketahui pada tahun-tahun sebelumnya Ranperda tentang RDTR ini sudah 2 (dua) kali dilakukan pembahasan/dikonsultasikan</p>	<p>Dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, menghasilkan dokumen materi teknis dan draft Ranperda yang sebagian besar mengalami perubahan serta draft naskah akademis Revisi RTRW Kota Gunungsitoli, Konsultasi Publik 2 (dua) kali dan Berita Acara Kesepakatan dengan kabupaten yang berbatasan (Nias Utara). Tahun 2022 akan dilakukan kesepakatan dengan Kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Nias), validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),</p>	<p>Agar ada Penyesuaian RTRW dengan perkembangan kebutuhan pembangunan</p>



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Rekomendasi Peta Dasar, dan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan DPRD Kota Gunungsitoli terkait muatan RTRW serta Rekomendasi peta dasar yang memuat batas administrasi wilayah Kota Gunungsitoli yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)	
6.	Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atas tersedianya air bersih, maka diharapkan kembali kepada pemerintah melalui Dinas PUPR agar memprogramkan dan melaksanakan pembangunan instalasi jaringan air bersih serta peningkatan pemanfaatan sarana air bersih yang sudah ada atau menjalin kerjasama dan atau pengambilalihan dengan PDAM dari Pemerintah Kabupaten Nias yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Telah dilaksanakannya pembangunan Sarana Air Bersih sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, adapun kegiatan dimaksud yang telah dilaksanakan adalah : 1. Pembangunan Sarana Air Bersih dari Sungai Miga Desa Mazingo Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Selatan, 2. Pembangunan Sarana Air Bersih Penampungan Air Hujan (PAH) di Desa Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Selain itu telah dilaksanakannya pemeliharaan SAB di desa Sisarahili Sisambualah dan Lolowonu Nikootano agar bangunan SAB yang ada dapat berfungsi dengan baik.	Peningkatan penyediaan air bersih
7.	Melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas kinerja yang dinilai masih belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya didalam mewujudkan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Gunungsitoli serta Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang pada RPJMD Tahun 2016-2021	Telah dilakukan evaluasi oleh pimpinan dengan pelantikan Kepala Dinas yang baru pada tanggal 9 November 2021	Menghadirkan kepemimpinan yang baru yang lebih kualitatif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, sehingga capaian program kegiatan tahun 2021 adalah : a. Realisasi Fisik 98,63% b. Realisasi Keuangan 96,38%
8.	Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh bedasarkan hasil survei yang telah dilakukan.	Telah melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada enam kecamatan Lingkup Wilayah Kota Gunungsitoli	Bertambahnya Data Rumah Tidak Layak Huni Terverifikasi sebanyak 300 Unit Rumah.
9.	Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja kiranya dalam melaksanakan	Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa melaksanakan Penegakan Perda yang telah	Pada tahun 2021 seluruh pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Perda



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	penegakan Perda dalam hal penertiban tidak terkesan pandang bulu dan mengedepankan prinsip kemanusiaan sehingga benturan-benturan antara masyarakat dan pemerintah dapat dihindarkan	ditetapkan serta berpihak pada kepentingan umum.	telah ditindaklanjuti oleh Satuan Pamong Praja
10.	Melaksanakan inventarisasi dan pengamanan yang maksimal terhadap objek-objek yang merupakan aset daerah diantaranya menempatkan personil pada setiap Puskesmas yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli	Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Kesehatan telah menyediakan personil tenaga keamanan dalam rangka pengamanan terhadap aset daerah diseluruh Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli	pengamanan terhadap aset daerah diseluruh Puskesmas wilayah Kota Gunungsitoli telah tersedia
11.	Dengan berbagai pertimbangan diharapkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan kajian untuk mengembangkan nomenklatur organisasi perangkat daerah dimaksud menjadi 2 (dua) yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Penanaman Modal	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli bahwa Pelayan Perizinan Terpadu dan Urusan Penanaman Modal berada pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Telah terlaksana pengembangan struktur organisasi Perangkat Daerah yang menangani fungsi pelayanan perizinan terpadu dan urusan penanaman modal
12.	Diharapkan kepada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar lahan yang sudah dihibahkan oleh masyarakat kiranya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilaksanakan pemanfaatan lahan dengan dilakukannya pengolahan lahan dan penanaman padi sawah pada lahan seluas 12 Ha di desa Siwalubania II Gunungsitoli Idanoi .2. Telah dilaksanakan pemanfaatan lahan dengan dilakukannya budidaya tanaman Hortikultura (Cabai, Sawit, Terong, Kangkung) pada lahan seluas 8 Ha di Desa Binaka Kec Gusit Idanoi.3. Telah dilaksanakan pemanfaatan lahan dengan dilakukannya pengolahan lahan dan pertanaman tanaman porang seluas 8 Ha di desa Hilimbowo Oloro Kec. Gusit Utara.4. Telah dilaksanakan pemanfaatan lahan dengan dilakukannya pengolahan lahan dan pertanaman tanaman porang seluas 1 Ha di desa Oloro Kec. Gusit Utara.	Upaya Peningkatan Produksi Pertanian



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
13.	Diharapkan untuk segera melaksanakan pengadaan bibit babi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat	Pengadaan Bibit ternak babi telah dilaksanakan sebanyak 120 Ekor dan telah didistribusikan ke kelompok penerima manfaat di 6 (enam) Kecamatan se-Kota Gunungsitoli pada Tahun 2021.	Upaya peningkatan populasi dan produksi ternak babi
14.	Diharapkan agar mampu mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan penggalian tanah timbunan yang ada di beberapa titik di wilayah Kota Gunungsitoli agar tidak terjadi kerusakan ekosistem dan mengganggu lingkungan	Telah dilaksanakan pertemuan dengan pemilik lahan/pengembang	Pengawasan terhadap penggalian tanah timbunan telah dilakukan
15.	Kewenangan BPD agar dipertegas lagi sehingga hubungan kerja dan komunikasi dengan perangkat desa yang ada dapat lebih baik	Kewenangan BPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 63	Harmonisasi komunikasi BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa
16.	Diharapkan agar pendamping desa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta aktif sehingga penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada, serta tepat dan transparan	Telah diadakan pertemuan/rapat koordinasi secara berkala antara Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli dengan Tenaga Pendamping Profesional	Penggunaan Dana Desa, ADD dan BHPR berjalan sesuai ketentuan, tepat guna dan transparan.
17.	Diharapkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk lebih cermat dalam menentukan/merekomendasikan lembaga penyelenggara Bimtek yang lebih berkualitas untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa sehingga apa yang diharapkan dari Bimtek dimaksud dapat tercapai dengan baik. Pelaksanaan Bimtek pada bulan April 2021 yang lalu di Medan, dikeluhkan oleh Perangkat Desa yang mengikuti terkesan pelaksanaannya asal-asalan dan hanya diikuti oleh beberapa desa saja sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal.	Pemerintah Kota Gunungsitoli dhi. Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli hanya merekomendasikan Lembaga Penyelenggara Bimtek tentang Pemerintahan Desa yang telah memenuhi persyaratan, yaitu : - Memiliki SK. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Penyelenggara Bimtek/Pelatihan - Memiliki rekomendasi dari Dirjen. Bina Pemerintahan Desa Kemendagri untuk menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dapat memilih Lembaga Penyelenggara Bimtek sesuai kebutuhan
18.	Diharapkan pembayaran honor perangkat desa sebaiknya dilakukan setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan UMK Kota Gunungsitoli	Pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2019 dan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah dhi. besaran ADD yang diterima desa.	Pembayaran Siltap dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pembayaran Siltap Perangkat Desa dapat dilaksanakan setiap bulan setelah penetapan APB Desa.	
19.	Diharapkan mampu memberikan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan bongkar muat sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya dan pengguna jalan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melaksanakan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan bongkar muat di wilayah Kota Gunungsitoli, dengan menindak beberapa kendaraan roda 6 (enam) keatas atau mobil ekspedisi. 2. Telah menyusun Surat Edaran Wali Kota Gunungsitoli Nomor : /551/1158/Dishub/2022 tentang Larangan Bongkar Muat dan parkir roda 6 keatas Di tepi jalan umum di Wilayah Kota Gunungsitoli. 	Penertiban ini dilaksanakan agar tidak terjadi kemacetan dan kesemrawutan di wilayah Kota Gunungsitoli.
20.	Memaksimalkan pengelolaan parkir melalui peningkatan SDM juru parkir sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat yang berdampak pada peningkatan PAD Kota Gunungsitoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan dan peningkatan pengawasan terhadap juru parkir di lapangan. 2. Telah mengevaluasi dan memecat beberapa juru parkir yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Telah menghunjuk Kepala Seksi Perparkiran untuk menangani langsung perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli 4. Telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 551/193/Dishub/2022 tentang Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Berlangganan. 	Dengan adanya tindakan dan evaluasi terhadap juru parkir dan juga pembenahan regulasi terkait dengan perparkiran, maka diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Parkir.
21.	Peningkatan pemanfaatan pasar dan pasar rakyat yang ada di Wilayah Kota Gunungsitoli serta mampu menata penempatan pedagang sehingga lebih teratur dan pelayanan yang diberikan lebih maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Nou Gunungsitoli telah difungsikan 2. Pasar Rakyat Gunungsitoli Alo'oa Sedang proses penempatan. 	Pasar Rakyat siap ditempati
22.	Diharapkan mampu memfasilitasi pemugaran	Melaksanakan pemugaran rumah adat pada Tahun	Rumah Adat di wilayah Kota Gunungsitoli



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	rumah adat yang ada di Wilayah Kota Gunungsitoli sehingga Rumah Adat yang ada dapat terjaga kelestariannya	Anggaran 2022 dan menganggarkan untuk lanjutan pemugaran pada Tahun Anggaran 2023	dapat berfungsi sebagai ikon kebudayaan sekaligus menjadi daya tarik wisata
23.	Diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk lebih giat mendatangkan investor dengan menawarkan berbagai objek wisata yang ada dengan daya tariknya tersendiri	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendatangkan investor pada Sektor Pariwisata Melakukan Desa wisata pengembangan desa wisata yang berlokasi di Kota Gunungsitoli	Bertambahnya Destinasi Wisata di Kota Gunungsitoli Menarik minat investor dengan adanya desa wisata.
24.	Diharapkan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk melaksanakan pengadaan alat Cold Storage dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan	Pengadaan <i>Cold Storage</i> di Kota Gunungsitoli perlu direncanakan secara matang mulai dari ketersediaan lahan, persyaratan pembangunannya dan ketersediaan pembiayaan. Terkait hal ini telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut: 1. Penyusunan Dokumen UKL/UPL 2. Study Kelayakan 3. Penyambungan Instalasi Listrik > 60 KVA 4. Penyediaan Air Bersih 5. Sondir Tanah, IMB dan Izin-izin yang diperlukan.	Peningkatan penanganan hasil tangkapan ikan nelayan
25.	Menindaklanjuti masalah penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa dan jika terindikasi korupsi agar dilakukan tindakan tegas agar penggunaan Dana Desa lebih transparan	Inspektorat Kota Gunungsitoli tetap menindaklanjuti permasalahan atas pengelolaan Dana Desa baik melalui pembinaan dan pemeriksaan. Pembinaan dilaksanakan melalui proses monitoring dan pemeriksaan reguler. Sedangkan Pemeriksaan lebih rinci dilakukan melalui metode pemeriksaan khusus . Inspektorat telah menyampaikan Laporan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus dan hasilnya beberapa desa yang	Proses pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa telah berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku



No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		telah diperiksa telah melakukan pemulihan ke rekening Kas Desa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan beberapa hal lain telah dikoordinasikan kepada Pihak Penegak Hukum.	
26.	Diharapkan tersedianya SDM aparatur yang handal pada Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli sehingga pelaksanaan tugas fasilitasi kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik	<ol style="list-style-type: none">1. Terkait dengan ketersediaan aparatur yang handal, Pemerintah Kota Gunungsitoli senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya aparatur diantaranya melalui Diklat, Bimtek dan sejenisnya. Akan tetapi tahun anggaran 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat keterbatasan pendanaan akibat refocusing anggaran2. ASN yang bertugas pada Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli akan senantiasa dievaluasi secara berkala melalui rotasi dan mutasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dhi. Wali Kota Gunungsitoli.	Pemerintah Kota Gunungsitoli senantiasa melakukan evaluasi terhadap ASN melalui mekanisme rotasi, mutasi dan promosi secara berkala berdasarkan kapasitas dan kinerja yang dinilai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dhi. Wali Kota Gunungsitoli
27.	Diharapkan bahwa pada setiap pelaksanaan kegiatan apapun, diantaranya pelatihan, peringatan hari besar kenegaraan agar tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertindak sesuai dengan kemauan kecamatan maupun desa itu sendiri	Terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari besar kenegaraan, Pemerintah Gunungsitoli dhi. Badan Kesbangpol Kota Gunungsitoli dan Panitia pelaksana senantiasa menyampaikan dan mengingatkan kepada pihak Kecamatan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19 sebagaimana pada pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke 76 Tahun 2021	Pelaksanaan kegiatan Hari Besar Kenegaraan telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku
28.	Diharapkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli agar memberikan tindakan tegas kepada Camat gunungsitoli Idanoi sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2020 yang terkesan dipaksakan dan melanggar ketentuan protokol kesehatan	Pelaksanaan evaluasi ASN secara berkala melalui rotasi dan mutasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dhi. Wali Kota Gunungsitoli.	Pemerintah Kota Gunungsitoli senantiasa melakukan evaluasi terhadap ASN melalui mekanisme rotasi, mutasi dan promosi secara berkala berdasarkan kapasitas dan kinerja yang dinilai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dhi. Wali Kota Gunungsitoli

